

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Anggun Asiatun ^{1*} Chairul Adhim ² Lilis Marlina ³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia. Email: dompuanggun7@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia. Email: chairuladhim@stieyapisdompu.ac.id

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia. Email: lilismarlina@stieyapisdompu.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: Agustus 11, 2025

Direvisi: Agustus 20, 2025

Disetujui: Agustus 30, 2025

DOI :

<https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.614>



ABSTRAK

Tujuan: Studi ini dilaksanakan untuk menguji dampak dari penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta efektivitas sistem pengendalian internal terhadap mutu laporan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling untuk mengumpulkan data primer dari 60 pegawai, yang kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern baik secara parsial maupun simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Implikasi: Peningkatan kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu dapat dioptimalkan dengan memperkuat pemahaman akuntansi pegawai, memaksimalkan pemanfaatan sistem, dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Kata Kunci: pemahaman akuntansi; sistem informasi akuntansi; sistem pengendalian internal; kualitas laporan keuangan.

Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menerapkan akuntabilitas publik secara serius. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah berkewajiban untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Salah satu media utama bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik adalah melalui laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71, 2010), laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Wali Kota No.57, 2021). Di Indonesia, upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ini diperkuat dengan lahirnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun, 2003) tentang Keuangan Negara. Peraturan ini secara

tegas mensyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari amanat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun, 2003), pemerintah menerbitkan (Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005, 2009) yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP ini berfungsi sebagai kerangka prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Namun, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemahaman terhadap SAP saja tidak cukup. Menurut (Ahmad Dani, 2023), faktor lain yang sangat penting adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Sistem ini merupakan penerapan teknologi untuk mengelompokkan, mencatat, dan memproses seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah secara sistematis. Hasil dari proses ini adalah laporan keuangan yang menjadi dasar informasi bagi para pihak terkait, khususnya dalam pengambilan keputusan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan suatu organisasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, sikap manajemen terhadap penerapan standar akuntansi sangat berkaitan dengan kepentingan mereka untuk mengungkapkan informasi kinerja finansial melalui pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory), yang mendasari kaidah-kaidah penyusunan laporan keuangan agar informasinya benar-benar bermanfaat. Secara umum, kualitas laporan keuangan diartikan sebagai catatan informasi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu yang mampu menggambarkan kinerjanya. Laporan keuangan yang berkualitas disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi entitas selama satu periode. Secara lebih spesifik dalam konteks pemerintahan, laporan ini digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta membantu menentukan ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2025).

Dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang secara konsisten didefinisikan baik dalam (PP No. 71, 2010) maupun (Permendagri, 2013) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan yang penggunaannya sejalan dengan amanat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun, 2003) tentang Keuangan Negara dan (Undang-Undang RI No 1, 2004) tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja sebagai pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Pentingnya sistem ini ditegaskan oleh penelitian (Siahaan & Simanjuntak, 2020; Apriliyani Wulandari, 2021; Febriana *et al.*, 2025) yang menemukan bahwa sistem informasi keuangan daerah, teknologi informasi, penerapan basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, tidak cukup hanya dengan ketersediaan sistem, tetapi juga menuntut penanggung jawab laporan keuangan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu yang berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan dana masyarakat. Kebutuhan ini menegaskan pentingnya akuntansi untuk mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah, yang tidak hanya memiliki konotasi politik tetapi juga aspek ekonomi yang signifikan. Untuk menjamin tercapainya akuntabilitas tersebut, pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang menurut (PP RI Nomor 60 Tahun, 2008), merupakan proses terpadu yang dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh pimpinan dan pegawai. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pondasi dari sistem pengendalian ini bukanlah sekadar aturan, melainkan sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi itu sendiri, yang secara kolektif membentuk lingkungan pengendalian yang baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara mendasar, sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dari berbagai transaksi dikumpulkan, lalu diproses menjadi informasi untuk didistribusikan kepada pengguna (Hall, 2007). Dalam konteks pemerintah daerah, ini diwujudkan sebagai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), yang didefinisikan sebagai serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, hingga pelaporan posisi dan operasi keuangan daerah (Vania Annissa Holle, Agustinus Salle, 2019). Untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan, diperlukan adanya pengendalian internal. (Agoes, 2018) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh personel entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tiga tujuan utama: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, serta (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berperan sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban mencatat seluruh transaksi pendapatan, belanja, dan aset. Untuk menjalankan fungsi vital ini, bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman akuntansi yang kuat, karena faktor ini terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pentingnya pemahaman akuntansi ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Mahardini & Miranti, 2018) di Provinsi Banten dan (Febriana *et al.*, 2025) di Kota Dompu. Studi tersebut secara spesifik menunjukkan tiga hasil utama: pertama, pemahaman akuntansi secara signifikan dan positif memengaruhi kualitas laporan keuangan; kedua, peran audit internal juga memiliki pengaruh signifikan positif; namun yang menarik, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah ditemukan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam studi tersebut.

Hasil observasi awal di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu teridentifikasi masih adanya sejumlah masalah yang berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan. Masalah-masalah tersebut mencakup kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi, ketidakakuratan data keuangan, kurangnya transparansi dan detail dalam penyajian laporan, serta lemahnya sistem pengendalian internal yang membuka celah bagi kesalahan dan penyimpangan. Isu-isu ini secara kolektif dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak dapat diandalkan, sehingga berisiko memengaruhi ketepatan keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan investor. Oleh karena itu, mendesak untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam guna mengetahui pengaruh faktor-

faktor kunci seperti pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini termotivasi untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh dari Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Dompu.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh (PP RI Nomor 8 Tahun, 2006) dan (PP RI Nomor 29 Tahun, 2014). Laporan yang berkualitas tidak hanya menunjukkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya, tetapi juga menjadi instrumen krusial untuk pengambilan keputusan strategis, membandingkan realisasi anggaran, mengevaluasi efektivitas program, dan memastikan ketaatan terhadap peraturan. Secara esensial, laporan keuangan harus memenuhi empat tujuan utama, yaitu Akuntabilitas (mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan), Manajemen (membantu perencanaan dan pengendalian), Transparansi (menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi publik), dan Keseimbangan Antar Generasi (menunjukkan kecukupan pembiayaan saat ini tanpa membebani generasi mendatang).

Agar dapat memenuhi berbagai tujuan tersebut, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan wajib memiliki karakteristik kualitatif yang membuatnya berguna bagi para pengambil keputusan (Obaidat, 2007). Mengacu pada (Atril & McLaney, 2019), kriteria utama yang harus dipenuhi meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu, serta mempertimbangkan keseimbangan biaya dan manfaat. Ditekankan bahwa relevansi dan keandalan saja tidak cukup; jika laporan tidak dapat dibandingkan, sulit dimengerti, atau tidak disajikan tepat waktu, maka nilainya akan berkurang secara signifikan. Dalam praktiknya, kualitas ini dapat diukur melalui beberapa indikator kunci, yaitu tingkat akurasi (bebas dari kesalahan), ketepatan waktu penyajian, dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu yang berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan dana masyarakat. Bidang ini menerapkan ilmu akuntansi pada entitas pemerintahan, yang memiliki aspek politik sekaligus ekonomi yang tidak dapat dipisahkan (Madjid, 2019). Untuk menjawab tuntutan tersebut, kerangka kerja formal ditetapkan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan (PP No. 71, 2010), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman resmi yang memuat prinsip-prinsip akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Karena sifatnya yang mengikat secara yuridis, penerapan SAP menjadi instrumen fundamental untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan di setiap level pemerintahan Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah.

Pemahaman yang mendalam terhadap SAP menjadi kunci untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, serta laporan arus kas (Madjid, 2019). Pemahaman ini tidak hanya sebatas pengetahuan teoretis tentang prinsip dan konsepnya, tetapi juga mencakup indikator yang lebih praktis. Hal ini merujuk pada tingkat pengetahuan seseorang tentang SAP dan, yang lebih krusial, kemampuan untuk mengaplikasikan standar tersebut secara akurat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain, penguasaan SAP yang efektif menggabungkan pemahaman konseptual dengan kecakapan teknis dalam pelaporan.

Sistem Informasi Akuntansi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan esensial dalam pemerintahan untuk mencapai pengelolaan data yang lebih cepat dan efisien. Secara konseptual, sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal untuk mengumpulkan data (transaksi) dan memprosesnya menjadi informasi yang didistribusikan kepada pengguna (Hall, 2007). Dalam konteks pemerintah daerah, ini diwujudkan sebagai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), yaitu prosedur manual dan terkomputerisasi untuk pelaporan keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2025). Sebuah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang komprehensif umumnya terdiri dari tiga subsistem utama: Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS) untuk mendukung operasi harian, Sistem Buku Besar/Pelaporan Keuangan (GL/FRS) untuk menghasilkan laporan keuangan standar seperti neraca, dan Sistem Pelaporan Manajemen (MRS) untuk menyediakan laporan khusus bagi pengambilan keputusan internal.

Dengan demikian, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat dimaknai sebagai penerapan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dan elektronik untuk mencatat dan melaporkan seluruh transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas pemerintah daerah. Efektivitas penerapan sistem ini dapat diukur melalui beberapa indikator kunci. Indikator tersebut meliputi tingkat penggunaan sistem dalam proses penyusunan laporan keuangan, kemampuan sistem untuk menghasilkan laporan yang akurat dan sesuai standar, serta tingkat integrasi sistem dengan aplikasi lainnya seperti sistem penganggaran dan manajemen keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi data.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sebuah proses terpadu yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan seluruh personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai (Ari Purwati et al, 2021) dan (Boynton & Kell, 2020). Secara umum, tujuannya mencakup empat aspek utama: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Untuk mencapai tujuan ini, pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengendalian internal akuntansi yang fokus pada perlindungan kekayaan dan keandalan data, serta pengendalian internal administratif yang mendorong efisiensi dan ketaatan pada kebijakan manajemen. Sistem ini sendiri terbangun dari lima komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Yudhoyono, 2008).

Dalam praktiknya, sistem pengendalian internal bertujuan memastikan seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif untuk mengarahkan dan memantau berbagai aktivitas demi tercapainya tujuan strategis. Efektivitas dari sistem ini dapat dievaluasi melalui beberapa indikator kunci.

Indikator tersebut tidak hanya mengukur tingkat efektivitasnya dalam mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan, tetapi juga kemampuannya untuk mendeteksi dan mengoreksi setiap penyimpangan yang lolos dari lapisan pencegahan. Selain itu, pilar fundamental yang menopang keberhasilan sistem ini adalah tingkat kepatuhan seluruh personel terhadap prosedur pengendalian internal yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji hubungan antar variabel. Populasi penelitian, mengacu pada Sugiyono (2017), adalah seluruh pegawai Dinas BPKAD Kabupaten Dompu yang berjumlah 106 orang. Dari populasi tersebut, diambil sampel sebanyak 60 orang dengan menggunakan metode non-probability sampling melalui teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2024).

Tabel 1. Kriteria Sampel

Kriteria	Jumlah
Akuntansi dan Pelaporan	16
Bidang Anggaran	18
Perbendaharaan dan Kas Daerah	26
Total	60

Sumber: Data Sekunder. 2025

Penelitian ini dirancang untuk mengukur pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang mengukur setiap variabel melalui indikator spesifik seperti tingkat pengetahuan, efektivitas sistem, dan akurasi laporan, yang didukung oleh tinjauan kepustakaan untuk memperkuat landasan teoretis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, hipotesis penelitian diuji secara statistik melalui Uji F untuk melihat pengaruh simultan, Uji t untuk pengaruh parsial atau individual, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil

Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 60 pegawai di bagian keuangan BPKAD Kabupaten Dompu, di mana seluruh kuesioner yang disebar berhasil kembali dan dapat diolah sehingga tingkat respons dan kelayakan data mencapai 100%. Adapun gambaran umum dari 60 responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 38 orang (63%), sementara sisanya 22 orang (37%) adalah laki-laki. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang 41-50 tahun sebanyak 25 orang (42%). Dilihat dari masa kerja, kelompok terbesar adalah pegawai yang telah bekerja selama 11-20 tahun sebanyak 26 orang

(43%), diikuti oleh masa kerja 6-10 tahun sebanyak 20 orang (34%), dan masa kerja di atas 20 tahun sebanyak 14 orang (23%).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Cronbach's Alpha	Keputusan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	X1.1	0,438	0,2732	0,986	Valid & Reliabel
	X1.2	0,861	0,2732		
	X1.3	0,975	0,2732		
	X1.4	0,935	0,2732		
	X1.5	0,934	0,2732		
	X1.6	0,969	0,2732		
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	X2.1	0,875	0,2732	0,954	Valid & Reliabel
	X2.2	0,919	0,2732		
	X2.3	0,932	0,2732		
	X2.4	0,943	0,2732		
	X2.5	0,664	0,2732		
	X2.6	0,778	0,2732		
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,645	0,2732	0,967	Valid & Reliabel
	X3.2	0,969	0,2732		
	X3.3	0,902	0,2732		
	X3.4	0,761	0,2732		
	X3.5	0,970	0,2732		
	X3.6	0,911	0,2732		
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,645	0,2732	0,953	Valid & Reliabel
	Y2	0,969	0,2732		
	Y3	0,902	0,2732		
	Y4	0,761	0,2732		
	Y5	0,970	0,2732		
	Y6	0,911	0,2732		

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Berdasar pada Tabel 2, karena semua nilai r-hitung melebihi r-tabel, maka seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner ini terbukti valid. Selanjutnya karena semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha yang jauh di atas 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk semua variabel adalah reliabel dan konsisten.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)	Keputusan
X1	0,709	Normal
X2	0,600	Normal
X3	0,596	Normal
Y	0,597	Normal

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Hasil uji normalitas yang tersaji pada Tabel 3 mengindikasikan bahwa sebaran data penelitian adalah normal. Hal ini dibuktikan oleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) untuk setiap variabel yang melampaui ambang batas 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keputusan
X1	0,396	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,901	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,524	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Mengacu pada Tabel 4, karena nilai signifikansi dari setiap variabel independen berada di atas ambang batas 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keputusan
X1	0,826	1,211	Tidak terjadi Multikolinearitas
X2	0,832	1,202	Tidak terjadi Multikolinearitas
X3	0,860	1,163	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5 mengindikasikan tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Hal ini dibuktikan dengan nilai Tolerance setiap variabel yang melampaui 0,10 serta nilai VIF yang secara konsisten lebih rendah dari 10.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	2,397	2,381		1,007	,318
1 X1	0,280	,050	,423	5.656	,000
X2	0,358	,058	,457	6.130	,000
X3	,114	,031	,266	3.624	,001

a. dependent variabel :Y

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Berdasarkan tabel Tabel 6 , maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,397 + 0,280 X1 + 0,358 X2 + 0,114 X3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 2,397 mengindikasikan bahwa nilai prediksi Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah sebesar angka tersebut ketika semua variabel independen bernilai nol. Selanjutnya, semua variabel independen menunjukkan pengaruh positif, di mana setiap kenaikan satu satuan pada Pemahaman Akuntansi (X1) akan meningkatkan Y sebesar 0,280; kenaikan satu satuan pada Pemanfaatan SIA (X2) akan meningkatkan Y sebesar 0,358; dan kenaikan satu satuan pada Sistem Pengendalian Internal (X3) akan meningkatkan Y sebesar 0,114. Interpretasi ini berlaku dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan.

Tabel 7. Uji Statistik t (t-test)
Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	2,397	2,381		1,007	,318
1 X1	0,280	,050	,423	5.656	,000
X2	0,358	,058	,457	6.130	,000
X3	,114	,031	,266	3.624	,001

a. dependent variabel :Y

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Hasil uji t (uji parsial) yang disajikan pada Tabel 7 secara konsisten mendukung semua hipotesis penelitian, di mana setiap variabel independen terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara rinci, Pemahaman Akuntansi (X1) menunjukkan pengaruh positif ($\beta=0,280$; sig.=0,000), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2) juga berpengaruh positif ($\beta=0,358$; sig.=0,000), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) berpengaruh positif ($\beta=0,114$; sig.=0,001). Karena semua nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dinyatakan diterima.

Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Square	DF	Mean squares	F	Sig
1 Regression	606,666	3	202,221	32,588	,000
Residual	297,857	48	6,205		
Total	904,519	51			

a. dependen variabel : Y

b. Predictors : (Constan), X1,X2,X3

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Pada Tabel 8, hasil Uji F. Nilai signifikansi yang diperoleh yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi secara simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 9. Hasil Uji R²
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std Error of the Estimate
1	0.861 ^a	0,741	0,727	1,919

a. Predictors : (Constan), X1,X2,X3

Sumber: Output SPSS 25. (2025)

Berdasarkan nilai Adjusted R Square pada Tabel 9, diketahui bahwa sebesar 72,7% perubahan pada kualitas laporan keuangan dapat diatribusikan kepada pengaruh kolektif dari pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Adapun sisanya sebesar 27,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

Pembahasan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H1)

Berdasarkan hasil analisis, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima. Temuan ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan, artinya semakin baik pemahaman dan penerapan akuntansi yang dimiliki oleh pegawai di BPKAD Kabupaten Dompu, maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini memperkuat dan sejalan dengan temuan sebelumnya oleh (Yanti *et al.*, 2020), yang juga menyimpulkan bahwa kompetensi akuntansi pegawai merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dilihat dari perspektif Teori Stewardship, pemerintah bertindak sebagai steward yang memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang andal dan berguna bagi masyarakat sebagai prinsipal. Penerapan SAP menjadi instrumen penting untuk memastikan kewajiban ini terpenuhi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Tri Ikyarti & Nila Aprila, 2019) yang semuanya menyatakan bahwa SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil ini bertolak belakang dengan penelitian oleh (Komang *et al.*, 2021) yang menemukan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2), yang menyatakan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, diterima. Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh positif yang signifikan, artinya semakin optimal pemanfaatan SIA oleh pegawai, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan di BPKAD Kabupaten Dompu. Hal ini menunjukkan bahwa SIA telah dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung proses pelaporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh (Nur *et al.*, 2023) dan (Rohmah *et al.*, 2020) yang juga menyimpulkan bahwa SIA secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara teoretis, sistem yang berkualitas dirancang untuk memudahkan entitas pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai akuntabilitasnya. Temuan ini mendukung Teori Stewardship, di mana pemerintah daerah sebagai steward (pengelola) menggunakan SIA sebagai alat krusial untuk memenuhi kewajiban akuntabilitasnya kepada publik sebagai prinsipal. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Emilianus Eo Kutu Goo & Paulus Libu Lamawitak, 2021), yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3), yang menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, diterima. Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh positif yang signifikan, artinya semakin baik SPI dilaksanakan oleh unsur pimpinan dan staf di BPKAD Kabupaten Dompu, maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil ini mendukung temuan sebelumnya oleh (Nur *et al.*, 2023), yang juga

membuktikan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun hasil statistik menunjukkan pengaruh positif, terdapat temuan dalam praktik yang mengindikasikan bahwa implementasi SPI di BPKAD Kabupaten Dompu belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan BPK pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 terkait permasalahan SPI, ketidakpatuhan, dan pengelolaan aset yang belum tertib. Kondisi ini bertolak belakang dengan Teori Stewardship, yang mengasumsikan bahwa pemerintah sebagai steward memiliki integritas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara akuntabel, di mana SPI menjadi instrumen utamanya. Kesenjangan ini kemungkinan terjadi karena beberapa kelemahan, seperti kurangnya ketegasan pimpinan terhadap pelanggaran, perencanaan risiko yang belum memadai, serta kurangnya evaluasi atas temuan audit. Perlu dicatat bahwa pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan merupakan topik dengan hasil yang beragam dalam literatur. Temuan penelitian ini, yang menunjukkan pengaruh signifikan, justru bertentangan dengan sejumlah penelitian lain. Studi yang dilakukan oleh (Apriliyani Wulandari, 2021) dan (Gustina, 2021) menyimpulkan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor kontekstual lain yang dapat memoderasi efektivitas penerapan SPI di berbagai lingkungan pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H4)

Berdasarkan hasil Uji F untuk hipotesis keempat (H4), dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hasil ini mengonfirmasi bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Temuan ini sangat sejalan dengan Teori Stewardship, yang memandang pemerintah sebagai steward (agen) yang bertanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan organisasi dan publik. Dengan menerapkan pilar-pilar tata kelola yang baik seperti mematuhi SAP (PP No. 71, 2010) dan melaksanakan pengelolaan keuangan yang mencakup sistem akuntansi dan pengendalian internal yang andal (PP Mendagri, 2020) pemerintah telah menjalankan perannya sebagai steward yang akuntabel. Hasil penelitian ini juga didukung oleh banyak studi sebelumnya yang secara konsisten menunjukkan pentingnya setiap variabel. Pengaruh signifikan dari Standar Akuntansi Pemerintahan telah dibuktikan oleh penelitian dari (Nur *et al.*, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa semua hipotesis yang diajukan diterima. Secara parsial, ditemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi (X1), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) masing-masing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lebih lanjut, pengujian secara simultan juga membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Secara praktis, hasil dari studi ini Peningkatan kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu dapat dioptimalkan dengan memperkuat pemahaman akuntansi pegawai, memaksimalkan pemanfaatan sistem, dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Studi ini menyarankan agar instansi terkait secara proaktif berinvestasi dalam pengembangan kompetensi pegawai guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya bagi staf yang terlibat langsung dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, penguatan pada tiga aspek krusial ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian laporan keuangan yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Referensi

- Agoes, S. (2018). Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan.
- Ahmad Dani. (2023). The Effect of Understanding of Government Accounting Standards And The Utilization Of Regional Financial Accounting Information Systems on The Quality of Regional Government Financial Reports In Parepare City. *Journal AK-99*, 3(1), 138–144. <https://doi.org/10.31850/ak99.v3i1.2275>
- Apriliyani Wulandari, D. (2021). Analisis Determinan yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BPKAD Kabupaten Dompu). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 989–998.
- Ari Purwati et al. (2021). Sistem Akuntansi.
- Atril, P., & McLaney, E. (2019). International Accounting and Finance for non-specialists. <http://books.google.com/books?id=3JQ4z9xhwvC&pgis=1>
- Emilianus Eo Kutu Goo, & Paulus Libu Lamawitak. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Febriana, L., Mahmud, M., & Mauzu, F. (2025). Pengaruh Pengawasan Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 437–448. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1652>
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 10(1), 56–64.
- Hall, J. (2007). Accounting Information Systems, Fifth Edition. In *Issues in Accounting Education* (Vol. 22).
- Komang et al. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Bandung. *Journal Karma*, 1(4). <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.14131>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2025). Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://www.jurnal.id/id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan-dalam-akuntansi-pemerintah-adalah/>
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In Yogyakarta (Issue 25). http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 48–58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>
- Obaidat, A. N. (2007). Accounting Information Qualitative Characteristics Gap: Evidence from Jordan. *International Management Review*, 3(2), 26–32.
- Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG: 6 HLM, September, 1–2.
- Peraturan Wali Kota No.57. (2021). Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah. 7–20.

- Permendagri. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi, 2013, 1–8.
- PP Mendagri. (2020). Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia, 445. <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- PP No. 71. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- PP RI Nomor 29 Tahun. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia, 2504, 1–9.
- PP RI Nomor 60 Tahun. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 76(3), 61–64.
- PP RI Nomor 8 Tahun. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. E-Jra, 9(5), 43–51. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8286>
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). Jurnal Manajemen, 6(2), 129–138.
- Tri Ikyarti & Nila Aprila. (2019). Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Bengkulu. September, 131–140.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Zitteliana, 19(8), 159–170.
- Undang-Undang RI No 1. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1. Jurnal Media Hukum, 1964(1), 1–122.
- Vania Annissa Holle, Agustinus Salle, M. S. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas. Vol.14, 16–35.
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>

Penulis korespondensi

Anggun Asiatun dapat dihubungi di: dompuanggun7@gmail.com

